KEPENTINGAN INGGRIS TERHADAP KERJASAMA DENGAN KOREA SELATAN PASCA REFERENDUM *BRITAIN EXIT* (BREXIT)

Chairunisa[1]

Abstract: *This research aims to explain the UK's interest in the BFTA-framed trade cooperation that it did with South Korea after the country carried out the Brexit Referendum in 2016. South Korea became the first and only country in Asia, especially East Asia, that could sign a BFTA trade agreement with UK even though at that time there was still no agreement on Brexit between UK and the European Union. The total value of trade between these two countries is £14.8 billion, which is the third largest agreement among the agreements the UK has made with 50 other countries or territories after the Brexit Referendum. In this study, the basic theoretical framework used is Decision Making Process (DMP) theory from William D. Coplin. The results show that the BFTA agreement between the UK and South Korea is not something massive. With various supporting factors obtained, the existence of this agreement is to continue the previous agreement and ensure that trade relations between two countries will not change regardless of the outcome of Brexit. So, it can be understood that UK's interest in its cooperation with South Korea after the Brexit Referendum is to maintain and secure the British economy before Brexit occurs, as well as protect the country against a hard Brexit or no-deal Brexit.*

Keywords: United Kingdom, South Korea, Brexit Referendum, interests, BFTA

Pendahuluan

Referendum Brexit adalah sebuah fenomena di dunia internasional dimana masyarakat Inggris mengadakan jajak pendapat untuk menentukan apakah negaranya harus keluar dari Uni Eropa atau tidak. Referendum ini dilaksanakan pada 23 Juni 2016, dengan hasil perolehan suara sebanyak 51,8% memilih Brexit dan 48,1% memilih Inggris tetap di Uni Eropa.

Sebelum referendum tersebut diadakan, Inggris telah menunjukkan sikapnya yang bertentangan dengan beberapa kebijakan Uni Eropa di berbagai kesempatan. Beberapa sikap ini adalah seperti menolak menerapkan kebijakan Schengen Area, dua bagian dari Perjanjian Maastricht dan lain-lain. Kemudian, keluarnya Inggris dari Uni Eropa juga didorong oleh kondisi ekonomi dan sosial dimana jumlah iuran yang harus dibayar Inggris tidak sepadan dengan penerimaan kembali, serta muncul permasalahan seputar meningkatnya imigran yang datang ke Inggris. Beberapa alasan inilah yang pada akhirnya membuat Inggris mengadakan referendum dan keluar dari Uni Eropa.

Ketika Inggris telah mengadakan referendum namun masih dalam proses Brexit, Inggris dan Korea Selatan melakukan kerjasama dagang bilateral dalam kerangka FTA (*Bilateral Free Trade Agreement*/BFTA) pada tanggal 22 Agustus 2019 (BBC.com, 2019). Meskipun telah ditandatangani pada tahun 2019, perjanjian ini masih belum dapat

[1] Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : chairunisa1998july@gmail.com.

berlaku secara langsung. Hal ini dikarenakan BFTA antara Inggris dan Korea Selatan hanya dapat berlaku setelah Inggris menyelesaikan kesepakatan dagangnya dengan Uni Eropa selama masa transisi Brexit. Sebelum adanya kesepakatan ini, perdagangan yang dilakukan antara kedua negara masih akan berada dibawah Uni Eropa karena Inggris masih tetap berdagang di dalam pasar tunggal institusi tersebut.

BFTA Inggris-Korea Selatan ini meliputi kesepakatan mengenai komoditas ekspor oleh Korea Selatan ke Inggris yang meliputi komponen suku cadang mobil dan kapal, dan sebaliknya komoditas ekspor Inggris ke Korea Selatan yang meliputi minyak mentah, mobil dan *whisky* . Jika melihat komoditas mobil yang diperdagangkan, terdapat beberapa hal yang menarik dari keputusan Inggris terhadap kerjasama perdagangan dengan Korea Selatan. Sebelum Inggris melakukan Referendum Brexit, Inggris telah bermitra dengan Jerman, AS dan Tiongkok dibawah naungan Uni Eropa. Inggris telah memiliki hubungan dagang dengan Jerman di Uni Eropa, yang merupakan eksportir mobil terbesar di dunia (Industrialin.com, 2016), sekaligus urutan ketiga negara penerima ekspor mobil Inggris (Statista.com, 2020), demikian sebaliknya (Koptyug, 2020). Penguatan kerjasama dengan Jerman pasca referendum Brexit akan lebih bermanfaat dan menguntungkan karena pemangkasan biaya dan waktu pengiriman dapat ditekan.

Demikian halnya dengan AS, yang merupakan pembeli mobil terbesar dari Inggris setelah Uni Eropa. Permintaan AS untuk mobil-mobil Inggris meningkat sebanyak 47.2% pada tahun 2017 (smmt.co.uk, 2017), dan menjadikannya sebagai tujuan utama ekspor mobil Inggris selain negara-negara di Uni Eropa.

Hal yang sama juga terjadi pada kemitraan dengan Tiongkok di Asia Timur. Tiongkok merupakan salah satu dari lima mitra dagang terbesar Inggris serta negara urutan kelima terbesar untuk penerima ekspor mobil Inggris, dengan presentase mencapai 6.12% pada tahun 2018 (Workman, 2021).

Namun dari semua pertimbangan ini, Inggris tetap memilih untuk memastikan hubungan dagangnya dengan Korea Selatan pasca Referendum Brexit. Kerjasama ini merupakan perjanjian pertama dan satu-satunya yang dijamin oleh Inggris terhadap negara di kawasan Asia, khususnya Asia Timur pasca Referendum Brexit. Bahkan dalam kerjasama tersebut, total nilai perdagangan antara kedua negara ini adalah sebesar £14.8 milyar, yang mana merupakan perjanjian ketiga terbesar (setelah Switzerland serta perjanjian gabungan antara Norwegia dan Islandia) (BBC.com, 2020) dari 13 perjanjian yang telah dilakukan Inggris dengan 50 negara atau teritori lain pasca Referendum Brexit ini. Singkatnya, dibandingkan beberapa calon mitra yang juga potensial, Inggris tetap memilih Korea Selatan sebagai mitra BFTA-nya pada saat itu.

Kerangka Teori

Teori *Decision Making Process* (DMP)

Untuk menjelaskan politik internasional, tiga aspek dasar yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah aktor-aktor internasional, interaksi diantara aktor tersebut, serta sistem politik internasional. Dalam menghadapi suatu bidang isu internasional, negara melalui pemerintah di dalamnya dapat melakukan suatu tindakan politik luar negeri tertentu. Munculnya tindakan ini didasarkan atas berbagai pertimbangan yang bersumber dari

berbagai hal-hal penentu atau determinan. Determinan yang menjadi dasar pertimbangan merupakan sebuah bagian yang berhubungan erat dengan politik luar negeri suatu negara dan pada akhirnya akan menyusun keseluruhan dari bagian-bagian tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan definisi dari DMP adalah sebuah proses yang dilakukan oleh aktor-aktor politik luar negeri suatu negara untuk mempertimbangkan dan memilih secara rasional tindakan politik yang akan dilakukan berdasarkan determinan yang berkaitan dengan suatu bidang isu tertentu. Dalam model analisa sederhana DMP, ada empat determinan yang mempengaruhi tindakan politik luar negeri, yaitu politik dalam negeri, pengambil keputusan politik luar negeri, kondisi ekonomi dan militer serta konteks internasional. Namun, hanya ada tiga determinan yang berhubungan dengan analisa permasalahan, yakni pengambil keputusan politik luar negeri, konteks internasional serta kondisi ekonomi (Coplin, 2003).

a. Pengambil Keputusan Politik Luar Negeri
   Pengambil keputusan politik luar negeri menjadi determinan awal dalam analisa kepentingan Inggris terhadap kerjasama BFTA dengan Korea Selatan. Pengambil keputusan merupakan seseorang yang dihadapkan dengan situasi tertentu, dimana ia juga bertanggung jawab kepada orang lain, ditekan oleh berbagai kondisi serta dipaksa untuk mengambil keputusan. Para pengambil keputusan ini dianggap sebagai aktor rasional, yang mana ia akan melibatkan proses intelektual sebelum akhirnya merumuskan suatu kebijakan. Proses intelektual ini terdiri dari empat langkah, yaitu mendefinisikan situasi, memilih tujuan, mencari alternatif dan memilih alternatif yang paling efektif.

b. Konteks Internasional
   Dalam langkah pertama dari proses intelektual, yakni mendefinisikan situasi, konteks internasional menjadi salah satu determinan yang mempengaruhi situasi yang dihadapi oleh pengambil keputusan. Konteks internasional merupakan suatu produk tindakan politik luar negeri seluruh negara – masa lampau, sekarang, masa depan – yang mungkin diantisipasi. Dalam konteks internasional, dengan asumsi bahwa peran-peran terbatas dalam konteks internasional memang menentukan kebijakan luar negeri, ada tiga elemen yang dapat menjadi dasar dari munculnya tindakan yang dilakukan oleh suatu negara. Tiga elemen ini adalah geografis, politik dan ekonomi. Dalam penelitian ini, hanya dua elemen yang akan digunakan untuk menjelaskan konteks internasional, yakni elemen politik dan ekonomi.

c. Kondisi Ekonomi
   Selain konteks internasional, determinan lain yang juga mempengaruhi situasi yang dihadapi oleh para pengambil keputusan adalah kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi dapat menjadi sebuah alat politik bagi negara untuk mencapai sasaran politik luar negerinya. Agar dapat mengetahui tentang bagaimana faktor ekonomi dapat menjadi alat bagi negara, maka dimensi kapabilitas ekonomi akan digunakan untuk menjelaskan hal apa yang membuat negara kuat atau lemah secara ekonomi. Dalam dimensi kapabilitas ekonomi, dua kriteria yang dapat membantu menjelaskan kekuatan dan kelemahan ekonomi negara adalah kapasitas untuk menghasilkan barang dan

jasa serta independensi relatif dari perdagangan internasional dan keuangan. Kedua kriteria ini bisa dijelaskan dengan melihat GNP suatu negara, komparasi GNP antar beberapa negara dan neraca pembayaran.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah jenis penelitian deksriptif, yang mana didalamnya akan diberikan penjelasan mengenai kerjasama antara Inggris dan Korea Selatan pasca Referendum Brexit dan menganalisis kepentingan Inggris terhadap kerjasama tersebut. Sedangkan, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi buku, jurnal penelitian, akses internet, skripsi terdahulu, media massa serta literatur yang terkait dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Kemudian, teknik analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif. Dengan menggunakan metode ini, suatu informasi tertulis akan digunakan untuk menjelaskan secara mendalam tentang isu yang diteliti sehingga kemudian terbentuk analisa yang sesuai dengan permasalahan.

Hasil dan Pembahasan

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, dari keempat determinan teori DMP, ada tiga yang digunakan untuk analisa permasalahan, yakni pengambil keputusan, konteks internasional dan kondisi ekonomi. Agar dapat lebih mudah dipahami, berikut adalah model analisa sederhana DMP yang telah disesuaikan dengan analisa permasalahan.

Gambar 1. Model Analisa Sederhana DMP

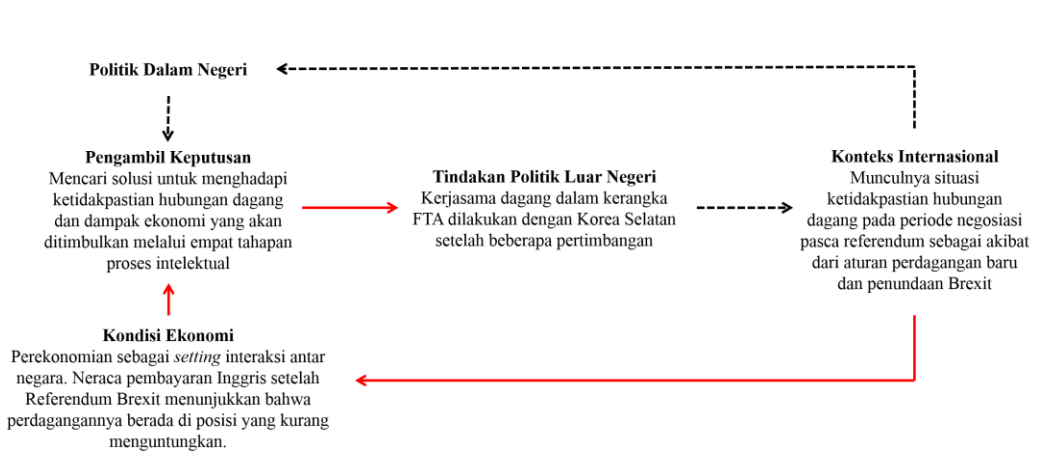

Catatan:

1. *Determinan yang diarahkan dengan garis utuh berwarna merah adalah bagian yang akan dijelaskan sesuai dengan teori dan rumusan masalah.*
2. *Determinan yang diarahkan dengan garis putus-putus berwarna hitam adalah bagian dari indikator teori yang dijelaskan.*
3. *Model diatas telah disesuaikan dengan permasalahan sehingga terdapat bagian yang tidak sesuai dengan teori aslinya.*

Berdasarkan model analisa di atas, analisa akan dimulai dari determinan pengambil keputusan. Situasi yang dihadapi oleh pemerintah Inggris sebagai pengambil keputusan kemudian dipengaruhi oleh dua determinan lain, yakni konteks internasional

dan kondisi ekonomi. Sebagai aktor pemecah masalah yang rasional, pengambil keputusan pun memutuskan suatu tindakan politik luar negeri berdasarkan pertimbangan yang muncul atas adanya dua determinan tersebut.

Proses Intelektual dan Situasi yang Mempengaruhinya

Pertimbangan para pengambil keputusan untuk memutuskan tindakan politik luar negerinya akan melibatkan suatu proses intelektual. Singkatnya, sebelum pemerintah Inggris memutuskan untuk bekerjasama dengan Korea Selatan pasca referendum, pemerintah Inggris akan melalui empat langkah dari proses intelektual, yakni mendefinisikan situasi, memilih tujuan, mencari alternatif dan memilih alternatif yang paling efektif.

Saat mendefinisikan situasi, konteks internasional dan kondisi ekonomi menjadi determinan yang mempengaruhi pemerintah Inggris sebagai pengambil keputusan. Dalam konteks internasional, tiga elemen dasar dari asumsi bahwa peran-peran terbatas dalam konteks internasional memang menentukan kebijakan luar negeri adalah geografis, politik dan ekonomi. Dalam penelitian ini, hanya dua elemen yang akan digunakan untuk menganalisis konteks Internasional, yakni elemen politik dan ekonomi.

Elemen politik dalam permasalahan ini adalah Referendum Brexit, dimana setelah terjadinya referendum pemerintah Inggris menggunakan Artikel 50 dari Perjanjian Lisbon untuk memulai periode negosiasi Brexit. Dalam periode negosiasi ini, hubungan antara Inggris dan Uni Eropa masih akan berjalan sebagaimana biasanya walaupun dalam hal pengambilan keputusan di dalam Uni Eropa, perwakilan Inggris tidak bisa lagi turut bergabung.

Selain itu, ada aturan perdagangan bagi Inggris selama periode ini. Oleh karena Inggris masih terhitung sebagai anggota Uni Eropa, Inggris masih akan berdagang di dalam pasar tunggal institusi tersebut. Meskipun begitu, Inggris tidak diperbolehkan melakukan negosiasi terkait perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa selama periode negosiasi. Dengan kata lain, hubungan dagang antara Inggris dan Uni Eropa, serta hubungan dagang antara Inggris dan negara lain dibawah Uni Eropa masih akan berjalan seperti biasa hingga ada perjanjian perdagangan baru antara Inggris dan Uni Eropa.

Dengan adanya aturan tersebut, maka Inggris dihadapkan dengan sebuah situasi internasional yang akan mempengaruhi kondisi perekonomiannya di masa depan. Karena Inggris belum mencapai kesepakatan dagang dengan Uni Eropa dan masih belum dapat menegosiasikannya, maka timbul ketidakpastian tentang hubungan dagang baik antara Inggris dengan Uni Eropa maupun Inggris dengan negara lain. Ketidakpastian hubungan dagang ini pun semakin menguat karena Inggris sempat menunda Brexit sebanyak dua kali hingga periode negosiasi diperpanjang. Hal ini pun harus diperhatikan karena perdagangan antara Inggris dan Uni Eropa bernilai sebesar 49% dan perjanjian dengan negara lain melalui Uni Eropa sebesar 11% dari total perdagangan Inggris pada tahun 2018.

Selain konteks internasional, kondisi ekonomi Inggris pasca Referendum Brexit menjadi suatu hal yang juga turut mempengaruhi pertimbangan pengambil keputusan. Oleh karena faktor ekonomi dapat menjadi alat bagi suatu negara, maka ada dua kriteria yang dapat membantu menjelaskan kekuatan dan kelemahan ekonomi negara dalam

dimensi kapabilitas ekonomi yaitu kapasitas untuk menghasilkan barang dan jasa serta independensi relatif dari perdagangan internasional dan keuangan.

Kriteria pertama yakni kapasitas untuk menghasilkan barang dan jasa, dapat dijelaskan dengan memasukkan analisa tentang kekayaan negara. Analisa ini dijelaskan melalui GNP (*Gross National Product*) dan komparasi tingkat kekayaan negara. Berikut adalah jumlah GNP Inggris dari tahun 2016 hingga 2019.

Gambar 2. GNP Inggris Tahun 2016-2019

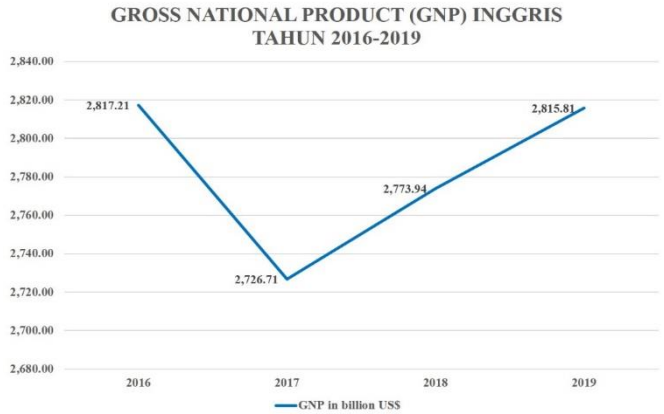

Berdasarkan gambar diatas yang menjelaskan tentang GNP Inggris dari tahun 2016 hingga tahun 2019, dapat diketahui bahwa GNP Inggris sempat mengalami penurunan di tahun 2017 yang kemudian kembali meningkat untuk 2 tahun berikutnya. Pada tahun 2016, nilai GNP Inggris adalah sebesar $2,817.21 milyar. Di tahun berikutnya, nilai ini mengalami penurunan menjadi $2,726.71 milyar. Selanjutnya, di tahun 2017 dan 2018 GNP Inggris mengalami peningkatan menjadi $2,773.94 dan $2,815.81 milyar.

Kemudian jika membandingkan tingkat GNP Inggris ini dengan calon mitra potensial Inggris yang lain seperti AS, Tiongkok, dan Jerman, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Apabila dibandingkan dengan Korea Selatan, tingkat kekayaan Inggris lebih tinggi dari negara tersebut. Sedangkan, apabila dibandingkan dengan negara sesama Uni Eropa, yakni Jerman, tingkat kekayaan Inggris lebih rendah walaupun perbedaan ini tidak terlalu jauh. Namun, tingkat kekayaan Inggris berbeda cukup jauh apabila dibandingkan dengan tingkat kekayaan AS dan Tiongkok.

Selanjutnya adalah kriteria kedua dalam dimensi kapabilitas ekonomi, yakni independensi relatif dari perdagangan internasional dan keuangan. Untuk menganalisa ini, maka akan digunakan neraca pembayaran Inggris pasca Referendum Brexit di tahun 2016 hingga tahun 2019.

Gambar 3. Neraca Pembayaran Inggris Tahun 2016-2019

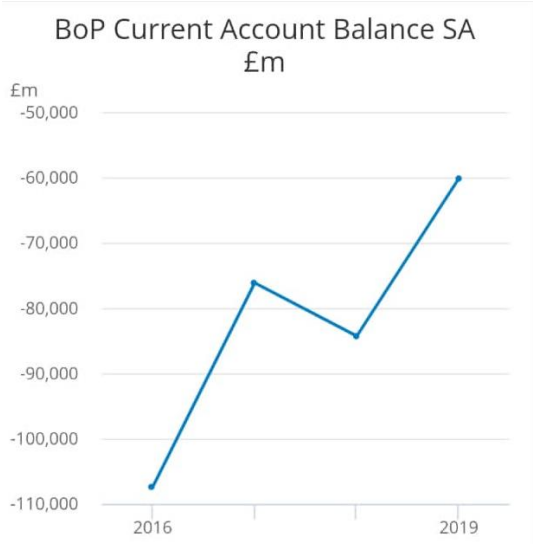

Dari neraca pembayaran Inggris tahun 2016 hingga 2019, dapat diketahui bahwa grafik sempat mengalami penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Pada tahun 2016, nilai neraca pembayaran Inggris adalah £-107.413 juta. Di tahun selanjutnya, nilai tersebut meningkat cukup banyak menjadi £-76.154 juta. Kemudian pada tahun 2018 nilai neraca pembayaran Inggris mengalami penurunan menjadi £-84.314 juta. Meskipun sempat mengalami penurunan, di tahun berikutnya nilai tersebut kembali meningkat menjadi £-60.165 juta. Jika melihat lebih dalam, maka dapat diketahui bahwa neraca pembayaran Inggris seringkali mengalami defisit. Defisit yang terjadi setiap tahunnya memang bukan hal yang baru, namun jika dilihat dari defisit yang lebih sering meningkat dibandingkan menurun dapat diketahui bahwa peningkatan ini diiringi dengan menurunnya pendapatan investasi Inggris (ONS, 2017). Sehingga, kesimpulan yang bisa ditarik berdasarkan penjelasan di atas adalah neraca pembayaran Inggris tidak dalam kondisi yang menguntungkan.

Pada akhirnya, dapat diketahui bahwa situasi yang harus diperhatikan pemerintah Inggris sebagai pengambil keputusan setelah Referendum Brexit adalah permasalahan ekonomi yang muncul selama periode negosiasi serta yang akan muncul ketika Inggris sudah keluar dari Uni Eropa. Setelah mendefinisikan situasi, langkah selanjutnya dalam proses intelektual adalah memilih tujuan. Terlaksananya Referendum Brexit memberikan kesempatan bagi Inggris untuk menjadi negara yang lebih terbuka di luar lingkup Uni Eropa. Inggris dapat lebih aktif mempromosikan negaranya sebagai negara yang independen (dalam arti bukan bagian dari Uni Eropa) serta berperan lebih banyak dalam dunia internasional. Sehingga, visi Inggris dalam Global Britain untuk menjadi "*a great global player*" dapat dicapai.

Setelah memilih tujuan, langkah ketiga yang harus dilakukan oleh pemerintah Inggris adalah mencari alternatif guna mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya kekhawatiran tentang perekonomian pasca Brexit, sudah jelas bahwa pengambil keputusan harus mencari solusi sedini mungkin sebelum Inggris keluar dari Uni Eropa. Sehingga, memperluas pasar Inggris dengan melakukan kerjasama dagang adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Solusi yang selaras dengan salah satu pilar Global Britain ini pun memunculkan pertanyaan tentang siapa yang dapat menjadi mitra potensial bagi

Inggris. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, AS, Jerman, Tiongkok dan Korea Selatan muncul sebagai calon mitra potensial Inggris. Selain itu, Inggris sudah memiliki kerjasama dalam kerangka FTA dengan Jerman dan Korea Selatan di bawah Uni Eropa. Dan walaupun belum ada kerjasama FTA dengan AS dan Tiongkok, kedua negara ini termasuk ke dalam daftar mitra utama Inggris.

Dengan adanya beberapa alternatif dari calon mitra potensial Inggris tersebut, maka pemerintah Inggris pun memasuki langkah terakhir dari proses intelektualnya, yakni memilih alternatif yang paling efektif untuk situasi yang sedang dihadapi. Pasca Referendum Brexit, keputusan yang diambil pemerintah Inggris adalah melakukan kerjasama dagang dalam kerangka BFTA dengan Korea Selatan. Pilihan ini didasarkan pada pertimbangan tentang Korea Selatan sebagai mitra yang potensial bagi Inggris. Korea Selatan merupakan negara urutan ke-7 sebagai mitra dagang surplus terbesar Inggris di tahun 2017. Selain itu, negara ini juga berada di urutan ke-13 dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2014.

Selain kedua hal diatas, ada beberapa hal menguntungkan lain apabila perusahaan Inggris mengekspor ke Korea Selatan. Pertama, Korea Selatan berada di posisi yang dekat dengan wilayah dan pasar Asia-Pasifik yang lebih luas. Kedua, jika mengingat perjanjian FTA yang sebelumnya, yakni KOREU FTA, Korea Selatan merupakan satu-satunya negara di wilayah Asia Timur atau Pasifik yang memiliki perjanjian FTA dengan Uni Eropa. Hal ini diperkirakan bernilai lebih dari £500 juta untuk bisnis Inggris setiap tahunnya. Ketiga, Korea Selatan memiliki pasar dengan pertumbuhan tinggi yang meningkat per tahunnya semenjak tahun 2009. Keempat, kebijakan ekonomi kreatif dari Presiden Park mendorong bisnis Korea Selatan menuju sektor dan industri dari kekuatan tradisional Inggris. (GOV.UK, 2015)

Pertimbangan dari Tindakan Politik Luar Negeri Inggris

Pilihan Inggris untuk melakukan kerjasama dagang BFTA dengan Korea Selatan pasca Referendum Brexit cukup menarik. Walaupun Korea Selatan merupakan mitra yang potensial, mengapa Inggris lebih memilih Korea Selatan dibandingkan dengan negara lain yang lebih ideal seperti Tiongkok, AS dan Jerman?

Agar dapat menjawab pertanyaan ini, kondisi dari negara-negara pembanding ini dilihat di rentang waktu yang sama, yakni ketika Inggris telah melaksanakan Referendum Brexit. Alasan mengapa Inggris tidak dapat melakukan kerjasama dagang dengan Jerman sebagaimana yang telah dilakukannya dengan Korea Selatan sebenarnya cukup jelas. Jerman termasuk ke dalam anggota Uni Eropa, yang berarti kerjasama bilateral antara keduanya belum dapat dilakukan. Belum ada kesepakatan tentang hubungan dagang antara Inggris dan Uni Eropa sehingga Inggris masih berdagang dengan Jerman melalui pasar tunggal Uni Eropa.

Berbeda dengan Jerman, AS bukan bagian dari Uni Eropa sehingga Inggris bebas untuk melakukan kerjasama atas kesepakatan kedua belah pihak. Ternyata, sebelum menandatangani perjanjian dengan Korea Selatan pada tanggal 22 Agustus 2019, Inggris telah menandatangani perjanjian dengan AS pada 14 Februari 2019. Namun, perjanjian ini bukanlah dalam kerangka BFTA seperti perjanjiannya dengan Korea Selatan, melainkan berbentuk *Mutual Recognition Agreement* (MRA). Ekspor produk AS ke

Inggris yang termasuk ke dalam perjanjian ini bernilai lebih dari $5 milyar pada tahun 2018 (USTR.GOV, 2019). Sehingga, walaupun bukan dalam kerangka FTA, setidaknya Inggris telah memiliki perjanjian dagang dengan salah satu mitra utamanya, AS, sebelum Brexit terjadi.

Selanjutnya, ada dua isu yang menyebabkan Inggris tidak melakukan kerjasama dengan Tiongkok pasca Referendum Brexit. Isu pertama adalah mengenai aksi protes yang dilakukan masyarakat Hong Kong kepada pemerintah Tiongkok. Pada tahun 2019, Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, menyatakan bahwa penangkapan massal dari para politisi dan aktivis di Hong Kong adalah serangan yang menyedihkan pada hak dan kebebasan Hong Kong yang dilindungi dibawah *Joint Declaration* serta menyalahi tujuan yang sebenarnya dari *National Security Law*.

Kemudian, di saat yang sama setidaknya pada masa pemerintah Presiden Donald Trump, Inggris cenderung mendekatkan dirinya ke AS. Sedangkan, di waktu ini hubungan antara AS dan Tiongkok sedang merenggang karena adanya permasalahan terkait dengan Huawei. Perusahaan tersebut telah diizinkan beroperasi dengan tingkat kebebasan yang moderat di Inggris bahkan sempat dipertimbangkan untuk bekerjasama dalam pengembangan 5G. Namun, pada akhirnya pemerintah Inggris memberikan pernyataan jelas bahwa hal itu bukanlah lagi pilihan. Oleh karena itulah, meskipun Inggris sedang berada dalam situasi mencari mitra baru yang menguntungkan dan Tiongkok memang kekuatan ekonomi besar di Asia., kerjasama antara Inggris dan Tiongkok akan sulit dicapai (Brown, 2021).

Oleh karena itulah pada akhirnya Inggris memutuskan untuk menawarkan kerjasama yang sama, atau mereplika kerjasama FTA yang sudah ada sejauh mungkin kepada Korea Selatan. Sehingga, kerjasama BFTA yang ditandatangani Inggris dan Korea Selatan di tahun 2019 ini juga dikenal dengan *continuous agreement* atau perjanjian berkelanjutan. Walaupun perjanjian BFTA 2019 mereplika perjanjian FTA 2011, beberapa perubahan tetap muncul sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain menjamin tentang keuntungan dagang diantara kedua negara, perjanjian ini juga muncul sebagai jaminan atas stabilitas perdagangan terlepas dari apakah Inggris akan keluar dari Uni Eropa dengan atau tanpa kesepakatan. Terlaksananya perjanjian ini dengan lancar juga tidak lepas dari sikap dari Korea Selatan yang proaktif sehingga membuat perjanjian antara kedua negara dapat lebih cepat dicapai.

Dari semua penjelasan diatas, kesimpulan yang bisa diambil adalah perjanjian dagang yang dilakukan antara Korea Selatan dan Inggris ini bukanlah sesuatu yang masif. Walaupun nilai perjanjian BFTA Korea Selatan-Inggris berada di posisi ketiga terbesar diantara perjanjian FTA pasca referendum lainnya, nilai ini masih jauh berbeda dengan perjanjian MRA Inggris-AS. Selain itu, satu tahun setelah perjanjian ini mulai berlaku, kontribusi dari nilai ekspor dan impor antara Inggris dan Korea Selatan pada total keseluruhan ekspor dan impor Inggris cukup kecil apabila dibandingkan dengan kontribusi dari mitra utama Inggris. Adanya perjanjian ini hanya melanjutkan perjanjian yang sudah ada sebelumnya serta menjamin hubungan dagang antara keduanya tidak akan berubah bagaimanapun hasil Brexit. Selain itu, negosiasi kesepakatan dagang antara Inggris dan Korea Selatan akan lebih cepat dicapai dibandingkan dengan negosiasi antara Inggris dan AS maupun dengan Tiongkok.

Sehingga, bisa dipahami bahwa kepentingan Inggris dalam kerjasama dengan Korea Selatan pasca Referendum Brexit adalah untuk menjaga dan mengamankan perekonomian Inggris sebelum Brexit terjadi. Kerjasama ini merupakan salah satu cara Inggris untuk membantu mengantisipasi dampak perekonomian Inggris yang kemungkinan besar akan terimbas setelah Inggris keluar dari Uni Eropa. Jadi untuk sementara waktu, ketika Inggris masih belum mampu mencapai kesepakatan dan bekerjasama dengan mitra dagang utamanya, Inggris sudah memiliki kerjasama dagang seperti yang dimilikinya dengan Korea Selatan untuk memproteksi negaranya terhadap *hard Brexit* atau *no-deal Brexit*.

Kesimpulan

Referendum Brexit yang diadakan Inggris pada tahun 2016 memberikan hasil bahwa sebagian besar masyarakat Inggris memilih negaranya untuk keluar dari Uni Eropa. Dalam proses menuju Brexit, Inggris dan Korea Selatan melakukan kerjasama dagang dalam kerangka BFTA pada tanggal 22 Agustus 2019. Sebelum terlaksananya Referendum Brexit, hubungan dagang antara keduanya terjalin di bawah naungan Uni Eropa. Hingga kemudian setelah referendum, Korea Selatan menjadi negara pertama di Asia, khususnya Asia Timur, yang dapat menyelesaikan perjanjian BFTA dengan Inggris. Selain itu, perjanjian dengan Korea Selatan ini merupakan perjanjian pertama yang ditandatangani Inggris pasca negara tersebut melakukan referendum.

Jika melihat komoditas mobil yang diperdagangkan, penguatan kerjasama dengan mitra dagang Inggris yang lain seperti AS, Jerman dan Tiongkok akan lebih menguntungkan. Namun, pada akhirnya Inggris tetap memilih melakukan kerjasama dengan Korea Selatan pasca referendum. Agar dapat mengetahui kepentingan Inggris terhadap kerjasamanya dengan Korea Selatan, maka telah digunakan teori DMP dari William D. Coplin. Analisa ini dimulai dari determinan pengambil keputusan dengan menggunakan empat langkah proses intelektual yaitu mendefinisikan situasi, memilih tujuan, mencari alternatif dan memilih alternatif.

Situasi yang harus dihadapi oleh pemerintah Inggris adalah mengenai permasalahan ekonomi yang muncul selama periode negosiasi maupun ketika Inggris sudah keluar dari Uni Eropa. Kemudian, setelah memilih tujuan untuk menjadi lebih terbuka diluar lingkup Uni Eropa, Inggris harus mencari alternatif untuk menghadapi kekhawatiran tentang perekonomian baik selama periode negosiasi maupun pasca Brexit. Solusi yang muncul adalah memperluas pasar Inggris dengan melakukan kerjasama dagang. Sehubungan dengan hal ini, calon mitra potensial yang muncul adalah AS, Jerman, Tiongkok dan Korea Selatan. Inggris sudah memiliki kerjasama FTA dengan Jerman dan Korea Selatan di bawah Uni Eropa. Selain itu, walaupun belum ada kerjasama FTA dengan AS dan Tiongkok, kedua negara ini termasuk ke dalam daftar mitra utama Inggris.

Pada akhirnya, alternatif yang dipilih Inggris adalah melakukan kerjasama BFTA dengan Korea Selatan pasca Referendum Brexit setelah beberapa pertimbangan tentang Korea Selatan sebagai mitra FTA-nya. Dengan ini, maka kepentingan Inggris terhadap kerjasama dengan Korea Selatan pasca Referendum Brexit adalah untuk menjaga dan mengamankan perekonomian Inggris sebelum Brexit secara resmi dilaksanakan. Kerjasama dagang yang disepakati dengan perjanjian BFTA Inggris-Korea Selatan ini

menjadi salah satu cara yang telah diperhitungkan Inggris untuk mengantisipasi dampak perekonomian Inggris yang kemungkinan besar akan terimbas setelah Brexit. Perjanjian ini bukanlah sesuatu yang masif dan hanya melanjutkan perjanjian yang sudah ada sebelumnya, sehingga menjamin hubungan dagang keduanya tidak akan berubah terlepas bagaimanapun hasil Brexit. Meskipun begitu, setidaknya untuk sementara waktu ketika Inggris masih belum dapat mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa dan mitra dagang utamanya yang lain, Inggris sudah memiliki proteksi untuk menghadapi *hard Brexit* atau *no-deal Brexit*.

Daftar Pustaka

BBC.com. 2019. *UK and South Korea sign 'continuity' trade agreement*. Tersedia di http:??www.bbc.com/news/business-49430207/

BBC.com. 2020. *Brexit: What trade deals has the UK done so far?*. Tersedia di www.bbc.com/news/amp/uk47213842

Brown, K. 2021. "China's Political Economy and the UK Post-Brexit". Tersedia di http:///www.e-ir.info/2021/02/02/chinas-political-economy-and-the-uk-post-brexit/

Coplin, W. D. 2003. "*Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis.* Bandung: Sinar Baru.

GOV.UK. 2015. *[Withdrawn] Doing Business in South Korea: South Korea trade and export guide*. United Kingdom: Department of International Trade.

Industrialin.com. 2016. *Top Car Exports by Country*. Tersedia di https://industrialin.com/news/top-car-exports-country

Koptyug, E. 2020. "Leading import countries for motor vehicles from Germany based on export value 2018" Tersedia di https://www.statista.com/statistics/587701/leading-import-coutries-german-motor-vehicles-by-export-value/

ONS. 2017. *UK Balance of Payments, The Pink Book: 2017*. United Kingdom: Office for National Statistics.

smmt.co.uk. 2017. *17 year high for British car manufacturing with US demand up nearly 50% – the UK's single biggest export country*. Tersedia di https://www.smmt.co.uk/2017/01/17-year-high-british-car-manufacturing-global-demand-hits-record-levels/

Statista.com. 2020. *Cars exported from the United Kingdom (UK) 2018, by main export destinations*. Tersedia di dari https://www.statista.com/statistics/298970/destination-of-cars-exported-from-the-united-kingdom/

USTR.GOV. 2019. *USTR Signs Mutual Recognition Agreements With The United Kingdom*. Tersedia di http://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2019/february/ustr-signs-mutual-recognition

Workman, D. 2021. *United Kingdom's Top Trading Partners*. Tersedia di http://www.worldstopexports.com/united-kingdom-top-import-partners/.